

PENGANTAR TEMATIK
SIMPOSIUM PENEGAKAN KEDAULATAN NEGARA
PERINGATAN PERISTIWA BERSEJARAH HARI PENEGAKAN KEDAULATAN NEGARA
DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN) DIY
TAHUN 2026
“Intelektual Muda Dan Pemecahan Masalah Kedaulatan”

A. Definisi dan Konsep Kedaulatan

Kedaulatan negara adalah kekuasaan tertinggi dan mutlak yang dimiliki suatu negara untuk mengatur pemerintahan, membuat hukum, serta menentukan kebijakan di dalam wilayahnya sendiri tanpa campur tangan pihak luar, serta berhak berhubungan dengan negara lain secara setara; ini mencakup kekuasaan tertinggi untuk menciptakan hukum (kedaulatan ke dalam) dan kekuasaan tertinggi untuk berhubungan dengan negara lain (kedaulatan ke luar).

Kedaulatan memiliki dimensi yang luas, di antaranya politik, hukum, ekonomi dan kebudayaan.

Dalam perspektif politik, kedaulatan negara merujuk pada otoritas sah tertinggi yang dimiliki oleh suatu negara untuk mengatur dan mengendalikan urusan internalnya secara eksklusif, serta bertindak secara mandiri di panggung internasional tanpa campur tangan eksternal.

Konsep ini memiliki dua aspek utama:

1. Kedaulatan Internal

Ini adalah kekuasaan tertinggi di dalam batas-batas wilayah negara. Kedaulatan internal mencakup hak eksklusif negara untuk:

- Membuat dan menegakkan hukum bagi semua orang dan entitas di wilayahnya.
- Menyelenggarakan pemerintahan dan menjaga ketertiban umum.
- Menggunakan kekerasan fisik secara legal (polisi, militer) untuk memastikan peraturan dipatuhi dan mencegah anarki.

Dalam negara demokrasi, kedaulatan internal sering kali dipegang oleh rakyat, yang pelaksanaannya diwakilkan kepada lembaga-lembaga pemerintahan melalui pemilihan umum (teori kedaulatan rakyat).

2. Kedaulatan Eksternal



Ini berkaitan dengan hubungan internasional, di mana suatu negara diakui sebagai entitas yang merdeka dan setara dengan negara-negara lain. Kedaulatan eksternal berarti:

- Negara tidak berada di bawah kekuasaan atau kendali negara lain.
- Negara memiliki kemampuan untuk menjalin hubungan formal, membuat perjanjian, dan terlibat dalam organisasi internasional.
- Semua negara berdaulat dianggap setara di mata hukum internasional, dan tidak ada negara yang berhak mencampuri urusan internal negara berdaulat lainnya.

Kedaulatan negara dalam perspektif ekonomi merujuk pada kemampuan suatu negara untuk secara mandiri mengelola sumber daya, kebijakan, dan keputusan ekonominya tanpa campur tangan atau kendali eksternal yang tidak semestinya. Konsep ini merupakan pilar utama bagi bangsa yang berdaulat, mandiri, dan sejahtera. Aspek-aspek utama dari kedaulatan ekonomi meliputi:

- Pengelolaan Sumber Daya: Negara memiliki hak dan wewenang tertinggi untuk mengatur dan memanfaatkan kekayaan alamnya (bumi, air, dan kekayaan yang terkandung di dalamnya) untuk kepentingan nasional dan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
- Perumusan Kebijakan Mandiri: Negara berhak menentukan arah kebijakan ekonominya sendiri, termasuk kebijakan perdagangan, industri, moneter, dan fiskal, yang selaras dengan prioritas domestik dan tujuan pembangunannya, tanpa didikte oleh pihak asing atau lembaga internasional.
- Ketahanan dan Kemandirian: Tujuannya adalah agar negara dapat mengatasi masalah-masalah internalnya seperti pengangguran, kemiskinan, dan kesenjangan ekonomi dengan kekuatan sendiri, mengurangi ketergantungan pada bantuan atau intervensi eksternal.
- Peran Regulator: Di Indonesia, misalnya, konsep ini sejalan dengan Ekonomi Pancasila, di mana negara berperan sebagai regulator yang menguasai cabang-cabang produksi yang penting bagi hajat hidup orang banyak, bukan berarti harus memiliki seluruh aset secara langsung, tetapi memastikan kontrol strategis ada di tangan negara.

Dalam era globalisasi, kedaulatan ekonomi menghadapi tantangan karena ketergantungan dan interkoneksi ekonomi antar negara yang semakin meningkat. Negara perlu menyeimbangkan antara partisipasi dalam perdagangan global dengan pemeliharaan kontrol atas agenda ekonomi domestiknya

Kedaulatan negara dalam perspektif kebudayaan merujuk pada hak dan kemampuan suatu bangsa untuk mempertahankan, mengendalikan, dan memajukan identitas, tradisi, serta praktik budayanya sendiri tanpa campur tangan atau dominasi dari pihak luar. Ini adalah aspek penting dari kemerdekaan suatu negara yang melengkapi kedaulatan politik dan ekonomi.

Aspek-aspek Penting Kedaulatan Budaya

- **Identitas Nasional:** Kebudayaan adalah fondasi karakter dan identitas suatu bangsa. Kedaulatan budaya memastikan bahwa nilai-nilai unik, bahasa nasional, bahasa daerah, sejarah, dan warisan budaya tetap lestari dan menjadi ciri khas negara.
- **Ketahanan Nasional:** Aspek sosial budaya memainkan peran penting dalam menjaga stabilitas dan keberlanjutan nasional. Kebudayaan berfungsi sebagai perekat persatuan di tengah keragaman, seperti semboyan Bhinneka Tunggal Ika di Indonesia.
- **Otonomi Kebijakan:** Negara berdaulat memiliki wewenang tertinggi untuk mengatur urusan internalnya, termasuk dalam hal pembangunan kebudayaan nasional. Hal ini mencakup perumusan strategi kebudayaan yang sesuai dengan nilai-nilai lokal, bukan didikte oleh tren global atau kekuatan asing.
- **Perlindungan Warisan Budaya:** Kedaulatan memberikan landasan hukum bagi negara untuk melindungi warisan budayanya, baik yang berwujud (candi, artefak) maupun tak berwujud (tarian, musik tradisional, kearifan lokal), dari eksploitasi atau klaim pihak lain.
- **Adaptasi dan Pengembangan:** Kedaulatan budaya tidak berarti menolak kemajuan, tetapi kemampuan untuk mengemas nilai-nilai tradisional dengan cara yang relevan dan kontekstual di era globalisasi, sehingga budaya lokal tetap hidup dan mampu bersaing secara global.

Di Indonesia, landasan hukum untuk memajukan kebudayaan nasional diatur dalam Pasal 32 UUD 1945 yang mengamanatkan negara untuk memajukan kebudayaan nasional di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya

B. Persoalan Indonesia Kontemporer tentang Kedaulatan

Persoalan pokok yang dihadapi Indonesia dalam hal kedaulatan politik terutama berkaitan dengan **kualitas demokrasi internal, stabilitas nasional, dan pengaruh eksternal di era globalisasi**. Tantangan ini mencakup aspek-aspek berikut:

Tantangan Internal



- **Integritas Pemilu dan Korupsi:** Praktik politik uang (*money politics*) dan korupsi, kolusi, serta nepotisme (KKN) masih menjadi ancaman serius yang merusak esensi kedaulatan rakyat. Hal ini melemahkan kepercayaan publik terhadap elite politik dan institusi demokrasi.
- **Politik Identitas dan Polarisasi Sosial:** Meningkatnya penggunaan politik identitas dan penyebaran hoaks serta disinformasi melalui media digital menyebabkan polarisasi sosial dan dapat memecah belah persatuan bangsa.
- **Pelemahan Supremasi Hukum:** Ancaman terhadap kedaulatan politik juga muncul dalam bentuk pelemahan supremasi hukum dan tantangan struktural, institusional, serta kultural dalam konsolidasi sistem demokrasi.
- **Kesenjangan Sosial dan Ekonomi:** Kesenjangan sosial dan ekonomi di masyarakat dapat menumbuhkan ketidakpuasan dan menjadi lahan subur bagi paham etnosentrisme dan radikalisme, yang mengancam keutuhan NKRI.

Tantangan Eksternal

- **Intervensi Asing:** Kedaulatan negara dapat terancam oleh intervensi politik asing yang berlebihan dalam kebijakan dalam negeri, serta infiltrasi budaya asing yang dapat menggerus identitas nasional.
- **Ancaman Siber:** Di era modern, perang siber dan penyebaran hoaks dari aktor eksternal juga merupakan ancaman non-militer yang dapat memengaruhi stabilitas politik dalam negeri.
- **Penegakan Batas Wilayah:** Indonesia, sebagai negara kepulauan, menghadapi tantangan dalam penegakan kedaulatan wilayahnya, seperti dalam isu perbatasan maritim (contohnya Blok Ambalat), yang memerlukan ketegasan berdasarkan hukum internasional seperti UNCLOS 1982.

Persoalan pokok yang dihadapi Indonesia dalam hal kedaulatan hukum berakar pada **tantangan dalam penegakan hukum yang efektif dan berkeadilan**, terutama terkait dengan **korupsi, intervensi politik, dan kurangnya independensi lembaga peradilan**.

Meskipun Indonesia secara tegas menganut teori kedaulatan hukum sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 Ayat (3) UUD 1945, dalam praktiknya terdapat beberapa tantangan utama:

- **Korupsi dan Penyalahgunaan Wewenang:** Kasus korupsi yang melibatkan pejabat publik dan aparat penegak hukum secara signifikan merusak citra dan kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum, serta menghambat penegakan hukum yang adil.



- **Intervensi Politik:** Adanya pengaruh atau intervensi politik dalam proses hukum dapat menggerus independensi lembaga penegak hukum dan peradilan, membuat keputusan hukum tidak murni berdasarkan keadilan dan fakta hukum.
- **Ketidaksetaraan Akses terhadap Keadilan:** Masih terdapat kesenjangan dalam kemampuan masyarakat, terutama masyarakat miskin atau marginal, untuk mengakses sistem peradilan dan mendapatkan perwakilan hukum yang layak.
- **Kelemahan Struktural dan Sumber Daya Manusia:** Kurangnya sumber daya manusia yang kompeten, sarana, dan fasilitas yang memadai di berbagai daerah juga menjadi hambatan dalam penegakan hukum.
- **Faktor Budaya dan Kesadaran Hukum Masyarakat:** Tingkat pemahaman dan kesadaran masyarakat mengenai hak-hak mereka serta kewajiban hukum masih perlu ditingkatkan.
- **Harmonisasi Peraturan:** Terdapat tantangan terkait tumpang tindih regulasi dan kurangnya harmonisasi antara peraturan perundang-undangan di berbagai tingkatan.

Persoalan pokok yang dihadapi Indonesia dalam hal kedaulatan ekonomi berkaitan dengan **ketergantungan terhadap pihak asing** dan **kerentanan terhadap gejolak global**, yang termanifestasi dalam beberapa isu utama.

Isu-isu pokok tersebut meliputi:

- **Ketergantungan Impor Pangan dan Energi:** Indonesia masih sangat bergantung pada impor untuk komoditas pangan utama (seperti beras, kedelai, dan gandum) serta energi. Ketergantungan ini membuat ketahanan pangan dan energi nasional rentan terhadap kenaikan harga global dan gangguan rantai pasokan, yang secara langsung mengancam kedaulatan pangan.
- **Penguasaan Sumber Daya Alam oleh Pihak Asing/Swasta:** Meskipun kaya akan sumber daya alam, pengelolaannya sering kali melibatkan perusahaan multinasional atau swasta besar, yang dapat mengurangi kontrol negara atas aset ekonomi strategis dan hasil kekayaan alam tersebut.
- **Utang Luar Negeri:** Beban utang, baik dari negara lain maupun lembaga keuangan internasional, dapat membatasi ruang gerak pemerintah dalam merumuskan kebijakan ekonomi yang sepenuhnya berorientasi pada kepentingan nasional, karena adanya kewajiban pembayaran dan potensi intervensi kebijakan.
- **Ketidakstabilan Nilai Tukar:** Gejolak pasar keuangan global sering kali berdampak signifikan pada nilai tukar rupiah, yang mempengaruhi daya beli masyarakat, inflasi, dan stabilitas ekonomi secara keseluruhan.

- **Kesenjangan Sosial dan Regional:** Disparitas ekonomi antar wilayah dan ketimpangan pendapatan di masyarakat masih menjadi tantangan besar. Hal ini dapat menghambat pemerataan kesejahteraan yang merupakan salah satu tujuan utama kedaulatan ekonomi.
- **Kelemahan Industri Manufaktur dan Ketergantungan Ekspor Bahan Mentah:** Ekonomi Indonesia masih didominasi oleh ekspor sumber daya alam mentah atau setengah jadi, sementara sektor industri manufaktur belum optimal. Hal ini menyebabkan kerentanan terhadap fluktuasi harga komoditas global dan kurangnya nilai tambah di dalam negeri.
- **Tantangan Globalisasi dan Perang Dagang:** Di era globalisasi, Indonesia menghadapi tekanan dari persaingan produk impor yang mengancam produk lokal serta ketidakpastian akibat perang dagang dan kebijakan proteksionisme negara lain.

Persoalan pokok yang dihadapi Indonesia dalam hal kedaulatan kebudayaan berakar pada **dominasi budaya asing** di era globalisasi dan **tantangan internal dalam melestarikan budaya lokal**. Masalah ini mengancam identitas nasional dan menyebabkan pergeseran nilai-nilai tradisional.

Tantangan Utama Kedaulatan Kebudayaan Indonesia

Beberapa persoalan kunci yang dihadapi meliputi:

- **Dominasi Budaya Asing:** Arus informasi dan hiburan global yang masif, terutama dari Barat dan Asia Timur (seperti demam K-Pop), menyebabkan generasi muda lebih mengenal dan menggemari budaya luar dibandingkan budaya lokal mereka sendiri.
- **Erosi Nilai-Nilai Budaya:** Masuknya ideologi dan gaya hidup asing, seperti individualisme, konsumerisme, dan liberalisme, mengikis nilai-nilai luhur bangsa seperti gotong royong, kekeluargaan, dan sopan santun.
- **Perubahan Gaya Hidup:** Globalisasi memengaruhi perubahan gaya hidup masyarakat yang cenderung instan dan pragmatis, menjauh dari tradisi dan kearifan lokal yang membutuhkan proses dan kesabaran.
- **Kurangnya Apresiasi dan Regenerasi:** Terdapat masalah kurangnya apresiasi terhadap budaya lokal serta tantangan dalam meregenerasi pelaku dan pewaris budaya, sehingga banyak tradisi terancam punah atau dilupakan.
- **Kesenjangan Akses dan Infrastruktur:** Ketimpangan akses terhadap sumber daya manusia, infrastruktur (terutama internet di daerah terpencil), dan dukungan pemerintah daerah menyebabkan pelestarian budaya menjadi tidak merata di seluruh wilayah Indonesia.

- **Permasalahan Sosial Internal:** Isu-isu mendasar seperti kemiskinan, kebodohan, dan ketidakadilan sosial menjadi titik pangkal ancaman di bidang sosial budaya yang dapat memicu konflik dan melemahkan persatuan nasional.

Secara keseluruhan, persoalan pokok tersebut adalah menjaga **keseimbangan** antara keterbukaan terhadap pengaruh global dan penguatan identitas budaya nasional untuk memastikan kedaulatan kebudayaan Indonesia tetap terjaga

C. Pemikiran Kaum Muda dalam pemecahan permasalahan Kedaulatan

Peran intelektual muda, khususnya mahasiswa Indonesia, sangat penting dan beragam dalam memecahkan permasalahan kedaulatan di berbagai bidang. Mereka bertindak sebagai agen perubahan (*agent of change*), pengawas sosial (*social control*), dan pemimpin masa depan yang menyuarakan aspirasi dan memberikan solusi konkret.

Berikut adalah peran spesifik mereka di setiap bidang:

1. Bidang Politik

- **Pengawasan Kebijakan:** Mahasiswa memegang peran kritis dalam mengawasi jalannya pemerintahan dan kebijakan publik. Melalui demonstrasi, petisi, dan advokasi, mereka menuntut akuntabilitas pemerintah dan memastikan kedaulatan politik tetap berada di tangan rakyat, bukan oligarki.
- **Pendidikan Politik:** Mahasiswa berkontribusi dalam meningkatkan literasi politik masyarakat, terutama di kalangan pemilih muda. Mereka menyelenggarakan diskusi publik, seminar, dan kampanye untuk mengedukasi tentang hak dan kewajiban politik, serta menolak golput.
- **Partisipasi Aktif:** Banyak mahasiswa yang terjun langsung ke dunia politik praktis melalui partai politik atau organisasi masyarakat sipil, membawa ide-ide segar dan etika politik yang bersih untuk memperkuat sistem demokrasi yang berdaulat [2].

2. Bidang Hukum

- **Advokasi dan Bantuan Hukum:** Mahasiswa Fakultas Hukum sering kali terlibat dalam lembaga bantuan hukum (LBH) untuk memberikan bantuan hukum gratis kepada masyarakat miskin dan rentan. Ini membantu memastikan akses terhadap keadilan yang merata dan menegakkan supremasi hukum.
- **Kajian Kritis:** Mereka melakukan kajian mendalam terhadap rancangan undang-undang (RUU) yang kontroversial dan mengadvokasi reformasi hukum untuk menciptakan sistem peradilan yang adil, transparan, dan tidak pandang bulu.

- **Penyuluhan Hukum:** Mahasiswa berperan dalam menyebarkan kesadaran hukum di masyarakat, membantu warga memahami hak-hak mereka dan prosedur hukum yang benar.

3. Bidang Ekonomi

- **Pemberdayaan UMKM:** Melalui program Kuliah Kerja Nyata (KKN) atau kegiatan wirausaha sosial, mahasiswa membantu Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) lokal untuk berkembang, misalnya dengan memanfaatkan teknologi digital. Ini memperkuat ekonomi kerakyatan dan mengurangi ketergantungan pada modal asing.
- **Inovasi dan Kewirausahaan:** Mahasiswa mengembangkan *start up* dan bisnis sosial yang berfokus pada solusi permasalahan lokal, seperti ketahanan pangan atau energi terbarukan, yang secara langsung mendukung kedaulatan ekonomi bangsa.
- **Pengawasan Ekonomi:** Mereka mengkritisi kebijakan ekonomi yang dianggap merugikan kedaulatan, seperti utang luar negeri yang berlebihan atau dominasi perusahaan multinasional, serta menyuarakan pentingnya produk dalam negeri.

4. Bidang Kebudayaan

- **Pelestarian Budaya Lokal:** Mahasiswa berperan aktif dalam melestarikan dan mempromosikan budaya lokal, baik melalui seni pertunjukan, festival budaya, maupun konten kreatif di media sosial. Ini melawan arus homogenisasi budaya akibat globalisasi dan memperkuat identitas nasional.
- **Dialog Antarbudaya:** Mereka memfasilitasi dialog dan kegiatan multikultural di kampus dan masyarakat untuk mempromosikan toleransi, kerukunan antar umat beragama, dan persatuan dalam keberagaman, yang sangat krusial bagi kedaulatan budaya bangsa.
- **Literasi Media dan Digital:** Mahasiswa mengampanyekan penggunaan media sosial yang bijak, melawan hoaks, dan memproduksi konten edukatif yang bernapaskan nilai-nilai luhur budaya Indonesia, menjaga ruang digital tetap sehat dan berdaulat dari pengaruh negatif asing.

Secara keseluruhan, peran mahasiswa adalah menjaga idealisme, menyuarakan kebenaran, dan bertindak nyata di masyarakat, memastikan bahwa kedaulatan Indonesia, dalam arti yang sesungguhnya, tetap terjaga dan terus berkembang

D. Undangan Penulisan artikel dan presentasi dalam Simposium HPKN 2026

Dari dasar-dasar pemikiran dan identifikasi permasalahan umum di bidang kedaulatan di atas maka, kami Dinas Kebudayaan DIY mengundang para intelektual muda, khususnya mahasiswa dari seluruh Indonesia untuk menyumbangkan pemikiran dalam pemecahan



masalah-masalah kedaulatan di Indonesia, baik permasalahan-permasalahan yang ditemukan di daerah masing-masing, maupun di tingkat nasional.